



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya United Nations Development Programme (UNDP)
dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender di Indonesia
Melalui Program Sustainable Development Goals (SDGs)

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Sunjoyo Jatmiko

2016330109

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya United Nations Development Programme (UNDP)
dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender di Indonesia
Melalui Program *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Skripsi

Oleh

Sunjoyo Jatmiko

2016330109

Pembimbing

Sukawarsini Djelantik, Ph.D.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

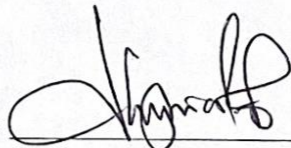


Tanda Pengesahan Skripsi

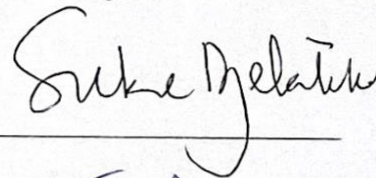
Nama : Sunjoyo Jatmiko
Nomor Pokok : 2016330109
Judul : Upaya *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender di Indonesia Melalui Program *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 18 Desember 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

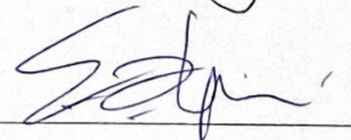
Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Sylvia Yazid, MPPM., Ph.D.

: 

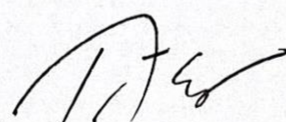
Sekretaris
Sukawarsini Djelantik, Ph.D.

: 

Anggota
Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sunjoyo Jatmiko

NPM : 2016330109

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender di Indonesia Melalui Program *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah pribadi dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 04 Desember 2019

Sunjoyo Jatmiko

2016330109

ABSTRACT

Name : Sunjoyo Jatmiko
Student Number : 2016330109
Title : *The Efforts of United Nations Development Programme (UNDP) in Increasing Gender Equality in Indonesia through Sustainable Development Goals (SDGs) Program*

The international organization United Nations Development Program (UNDP) is one of the actors trying to realize a world that upholds gender equality. Helping countries all over the world in achieving their goal, Indonesia is one of UNDP's partner countries. To realize gender equality in the world, UNDP sparked a 15-year development agenda known as the Sustainable Development Goals (SDGs) where gender equality is one of the goals on this global agenda more precisely objective number 5. This research was conducted because according to the annual report of UNDP, over the past four years, since the start of the SDGs, gender equality in Indonesia has stagnated. Using the theory of institutional liberalism, the concept of international organization by Clive Archer, and the concept of gender mainstreaming, this research aims to produce an explanation regarding the efforts of UNDP in improving gender equality in Indonesia through the SDGs program. By analyzing three programs related to gender equality that UNDP implemented in Indonesia as other program representations, namely the Gender Equality Strategy (2018-2021), the UNDP Gender Equality Seal Certification Program, and the 16 Days of Activism Campaign, the results of this research prove that the program implemented by UNDP in Indonesia has actually been quite effective because gender equality in Indonesia has begun to develop properly in view of the achievement of most of the objectives of the implementation of UNDP programs. However, because there are still many challenges such as the representation of women in parliament that have not reached 30% as targeted in affirmative action (Law No. 8/2012 on General Elections), there are still wage gaps between men and women, the amount of violence against women that has increased every year, the regulations on Gender Mainstreaming (PUG) in Indonesia that are already quite strong, but their implementation still faces challenges such as the mindset and political desires related to PUG which are still diverse, and the availability of disaggregated data that is not yet optimal, and so on. Therefore, greater efforts are needed from various parties to get out of the existing stagnation.

Keywords: *Gender equality, United Nations Development Programme, Sustainable Development Goals, Indonesia, World*

ABSTRAK

Nama : Sunjoyo Jatmiko
NPM : 2016330109
Judul : Upaya *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender di Indonesia Melalui Program *Sustainable Development Goals*

Organisasi internasional *United Nations Development Programme* (UNDP) adalah salah satu aktor yang mencoba untuk mewujudkan dunia yang menjunjung kesetaraan gender. Membantu negara-negara di dunia dalam mencapai suatu tujuan, Indonesia merupakan salah satu negara mitra UNDP. Untuk mewujudkan kesetaraan gender di dunia, UNDP mencetuskan suatu agenda pembangunan 15 tahun yang dikenal dengan nama *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan yang ada di dalam agenda global ini lebih tepatnya tujuan nomor 5. Penelitian ini dilakukan karena menurut laporan tahunan UNDP, selama empat tahun belakangan ini, sejak dimulainya SDGs, kesetaraan gender di Indonesia mengalami stagnasi. Dengan menggunakan teori liberalisme institusional, konsep organisasi internasional oleh Clive Archer, dan konsep pengarusutamaan gender, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu penjelasan mengenai bagaimana upaya UNDP dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia melalui program SDGs. Dengan menganalisis tiga program terkait kesetaraan gender yang UNDP terapkan di Indonesia sebagai representasi program lainnya yaitu Strategi Pengarusutamaan Gender (2018-2021), Program Segel Sertifikasi Kesetaraan Gender UNDP, dan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa program-program yang diimplementasikan oleh UNDP di Indonesia sebenarnya sudah cukup efektif dikarenakan kesetaraan gender di Indonesia sudah mulai berkembang dengan baik dilihat dari tercapainya sebagian besar tujuan diimplementasikannya program-program UNDP. Tetapi, karena masih banyaknya tantangan seperti keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai 30% seperti ditargetkan dalam *affirmative action* (UU No. 8/ Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum), masih adanya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan, jumlah kekerasan terhadap perempuan yang meningkat setiap tahunnya, regulasi pada Pengarus Utama Gender (PUG) di Indonesia yang sudah cukup kuat, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti pola pikir dan keinginan politik terkait PUG yang masih beragam, dan ketersediaan data terpilah yang belum optimal, dan lain-lain. Dengan begitu, dibutuhkan upaya yang lebih besar dari berbagai pihak untuk keluar dari stagnasi yang ada.

Kata Kunci: Kesetaraan gender, *United Nations Development Programme*, *Sustainable Development Goals*, Indonesia, Dunia

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Upaya *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender di Indonesia Melalui Program *Sustainable Development Goals* (SDGs)”** yang penulis susun dengan tepat waktu. Penelitian ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam perjalanan penulis sebagai salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana upaya UNDP sebagai organisasi internasional dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia yang memiliki stagnasi dalam bidang kesetaraan gender di empat tahun terakhir yakni tepat pada tahun mulai diberlakukannya program SDGs. Penelitian ini juga penulis harapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memperluas wawasan mengenai upaya UNDP sebagai organisasi internasional dalam membantu negara, dalam hal ini Indonesia terkait meningkatkan kesetaraan gender.

Terima kasih tidak lupa penulis ucapkan kepada Tuhan YME, keluarga, teman-teman, serta seluruh pihak lain yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan selama proses penelitian ini berlangsung hingga selesai. Kemudian penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sukawarsini Djelantik, Ph.D. selaku dosen pembimbing atas bantuan arahan dan bimbingannya selama

proses penelitian ini berlangsung bahkan jauh sebelum itu dimulai dari bantuan penentuan judul penelitian dan penyusunan rancangan penelitian.

Akhir kata, penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi penelitian yang bermanfaat dan berguna bagi siapapun yang membacanya. Sekian kata pengantar dari penulis, maaf bila ada salah kata, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada;

1. Allah SWT karena jika bukan karena kehendak-Nya, maka penulis tidak mungkin ada di dunia ini dan berhasil menyelesaikan penelitian ini.
2. Ibu Sita Aripurnami, Bapak Agung Setyo Wicaksono, Mas Anindyo Baskoro (Nino), Mba Nurani Pertiwi (Nik), Sanjoyo Waskito (Tito), Mbah Putri, Lek'lan, dan saudara-saudara yang tidak mungkin penulis tulis satu per-satu karena telah menjadi keluarga yang selalu membantu, mendukung, menyemangati, dan mendoakan penulis selama penelitian ini berlangsung.
3. Eceu dan Mbak Darti yang bila penulis pulang selalu siap mencuci baju kotor dari Bandung dan memasak makanan yang membuat penulis rindu masakan rumah.
4. Teman-teman penulis di Universitas Katolik Parahyangan: Richard Theo Parulian Tambunan, Mahira Kanya Taqiya, Aretta Ananda Putri, Nydia Anjani, Rayvindira Athena, Nikolas Aditya, Rizky Yudha, Syifa Maisyura, Christ Moudy, Teresa Gabriella, Tristan Adi Pradana Ashari, Zakinisma Nurhadian, Mazalvar Rachmat, Nadia Viranissa, Thalia Alzira, Tiana Azalia, Jhon Geovany, Alexa Danielle, Hani Indita, Jessica Viani Kurniawan, Ezra Reyhan, Ezraella Meirani, Andi Muhammad, Ananda Jordan Bintang, Adhyaksa Krisdananjaya, Daviga Teguh, Diko Christopher, Entol Farras Salim, Louis Lumban Gaol, Rafi Hugo, Annisa Putri Sadanoer, Gabrielle Angel, Rangga Cesario, M. Hafidh Al-Ghani, Aditya Imansyah, Nabila Aulia, Cahyadi Tampake, Bella Dominica, Raihan Zahirah, Veronica Acintya, Alia Andynar, Shafira Nadyariza Widjaja, Liony

Widjaja, Felicia Tiara, Verins Aura, Nadine Putri, Victoria Venessa, Sarita Sekar Laras, Andanareswari Wardhani, Priscilla Puspita, dan teman-teman HI Unpar, teman-teman non-HI, Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (HMPSIHI), Divisi Internal HMPSIHI, Tim Sukses Berani Berdampak, Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM) Dedikasi, Unpar Ambassador, Unit Kegiatan Mahasiswa Unpar Radio Station, serta Klub Softball Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat saya sebutkan satu per-satu namanya karena telah menjadi teman seperjuangan dalam menjalani masa-masa kuliah, kepanitiaan, dan organisasi di Universitas Katolik Parahyangan.

5. Teman-teman non-Unpar penulis: Damar Masato Hadisumarto, Agasha Kareef Ratam, Damar Bijak Dimasakti, Muhammad Naufal, Chairul Rizky Wisnuputro, Wiratama Dhaneswara Sungkono, Ghina Ratna Pertiwi, Alya Iranti, Abhiyoga Dirdanaraputra Gautama, Abimael Candraditya, Xendra Nara, Bara Mudita, dan teman-teman dari Al-Izhar Pondok Labu, Garuda Baseball & Softball Club, dan DOOgether yang selalu memberikan dukungan moral dan doa walaupun terpisahkan oleh jarak.

6. Ibu Sukawarsini Djelantik selaku dosen pembimbing penulis yang bersedia membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dimulai dari mencari judul, merancang proposal penelitian hingga penelitian ini selesai.

7. Ibu Sylvia Yazid dan Ibu Elisabeth A. Satya Dewi selaku dosen penguji penulis yang telah bersedia meluangkan waktu disela kesibukannya.

8. Seluruh entitas yang ada di Universitas Katolik Parahyangan yang telah mengajarkan penulis banyak hal dalam 3,5 tahun penulis hidup di Bandung.

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.1 Pembatasan Masalah	10
1.2.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian	12
1.4 Tinjauan Pustaka	12
1.5 Kerangka Pemikiran.....	16
1.6 Metode Penelitian	28
1.7 Teknik Pengumpulan Data.....	28
1.8 Sistematika Pembahasan	29
BAB II <i>UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME,</i>	
<i>KETIDAKSETARAAN GENDER, DAN SUSTAINABLE</i>	
<i>DEVELOPMENT GOALS</i>	31
2.1 Organisasi Internasional UNDP di Dunia dan di Indonesia	32
2.2 Isu Ketidaksetaraan Gender di Dunia dan di Indonesia	38
2.3 Program SDGs di Dunia dan di Indonesia.....	45
2.4 Program <i>SDGs</i> Nomor 5 (Kesetaraan Gender) di Dunia dan di	
Indonesia	54
BAB III UPAYA-UPAYA UNDP DALAM MENINGKATKAN	
KESETARAAN GENDER MELALUI PROGRAM SDGS	68
3.1 Mengimplementasikan Strategi Pengarusutamaan Gender	
(2018-2021)	68

3.2 Mengadopsi Program Segel Sertifikasi Kesetaraan Gender	
UNDP	81
3.3 Mengampanyekan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap	
Perempuan	89
BAB IV	104
KESIMPULAN.....	104
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Laporan Tahunan UNDP Terkait Implementasi SDGs di Indonesia 2016-2019	53
Gambar 3.1 Infografis Kesenjangan Gender Bidang Ketenagakerjaan	70
Gambar 3.2 Rata-rata Upah Pekerjaan Berdasarkan Gender Tahun 2016 – Februari 2019	72
Gambar 3.3 Data Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2007 – 2018	73
Gambar 3.4 Infografis Partisipasi Perempuan di Bidang Politik	75
Gambar 3.5 Persentase Keterwakilan Perempuan di Bidang Pengambilan Keputusan	76
Gambar 3.6 Infografis Fakta Responsif Gender	77
Gambar 3.7 10 Langkah untuk Mendapatkan <i>Gender Equality Seal</i>	84
Gambar 3.8 Tema Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2016-2019	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara sudah bukan menjadi satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Organisasi internasional seperti *World Trade Organization (WTO)*, *International Monetary Fund (IMF)*, *World Bank*, dan *United Nations* beserta institusi-institusi dibawahnya pun juga sudah menjadi aktor dalam hubungan internasional.¹ Salah satu contoh organisasi internasional adalah *United Nations Development Programme (UNDP)* yang merupakan jaringan pengembangan dari organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendukung perubahan dan menghubungkan negara kepada pengetahuan, pengalaman, dan sumber-sumber untuk membantu manusia dalam membangun hidup yang lebih baik. UNDP memiliki perwakilan di 170 negara dan mendukung pengembangan kapasitas nasional dan lokal yang akan membantu suatu negara mencapai perkembangan manusia dan pembangunan berkelanjutan dimana salah satu negara mitra UNDP adalah Indonesia.² Fokus pekerjaan UNDP terkonsentrasi menjadi tiga area yaitu; ketahanan iklim dan bencana, pemerintahan yang demokratis dan pembangunan perdamaian, serta pembangunan berkelanjutan.³

¹ Robert Jackson & Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 105.

² UNDP About Us: UNDP and the UN, <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/about-us/undp-and-the-un.html>, diakses pada tanggal 26 Juli 2019.

³ UNDP About Us: FAQ, <http://www.undp.org/content/undp/en/home/about-us/faqs.html>, diakses pada tanggal 26 Juli 2019.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai jaringan pengembangan guna mendukung perubahan dan menghubungkan negara kepada pengetahuan, pengalaman, dan sumber-sumber untuk membantu manusia dalam membangun hidup yang lebih baik dan mendukung pengembangan kapasitas nasional dan lokal dalam mencapai perkembangan manusia dan *sustainable development goals*/tujuan pembangunan berkelanjutan, UNDP merancang suatu program yang dikenal dengan nama *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan program lanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs). SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target, dan merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. UNDP mengusung prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal. SDGs mencoba memuat masalah global menjadi agenda 15 tahun (hingga tahun 2030) dimana salah satu tujuan yang disusun adalah mencapai kesetaraan gender yang menjadi tujuan SDGs nomor 5.⁴

Kesetaraan gender perlu diperjuangkan karena isu ini sudah ada sejak dulu dimana strata atau tingkatan di dunia melihat wanita berada di bawah pria dan hal ini merupakan hal yang tidak adil dan salah. Karena hal ini, wanita mendapat banyak ketidakadilan seperti wanita bekerja 70% dari jam kerja dunia tetapi hanya mendapatkan 10% dari pendapatan dunia. Selain itu lebih dari 1 banding 3 wanita

⁴ Ranjani K. Murthy & Mercy Kappen, *Gender Equality and Sustainable Development Goals* (India: Visthar, 2017).

pernah mengalami pelecehan semasa hidupnya, lalu 1 dari 10 wanita di dunia pernah mengalami suatu bentuk pemaksaan aktivitas seksual, kemudian lebih dari 60% wanita pernah mengalami kekerasan tetapi takut untuk mencari bantuan, dan masih banyak lagi. Karena masih adanya masalah inilah, kesetaraan gender perlu diperjuangkan.⁵

Memperjuangkan kesetaraan gender juga sejalan dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang merupakan kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan dan telah ditandatangani pada tahun 18 Desember 1979 lalu diratifikasi pada 3 September 1981. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma, dan standar-standar kelakuan dan kewajiban dimana negara-negara peserta konvensi ini sepakat untuk memenuhinya. Konvensi ini juga menyepakati penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang memungkinkan setiap individu atau kelompok yang tidak puas atas pelaksanaan CEDAW di negaranya dapat mengajukan masalahnya langsung pada pemerintah negara masing-masing atau pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dari 189 negara yang ikut menandatangani CEDAW atau ICEDAW (*International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut tanda tangan di dalamnya.⁶

⁵ Lembar Fakta SDGs Indonesia, http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Factsheet_TPB_Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 26 Juli 2019.

⁶ The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and its Optional Protocol, http://archive.ipu.org/PDF/publications/cedaw_en.pdf, diakses pada tanggal 28 Juli 2019.

Upaya untuk meraih kesetaraan gender telah dirintis sejak lama, terutama di sejumlah negara Barat pada abad ke-17. Rintisan ini mendorong pembentukan berbagai kesepakatan internasional yang mengikat seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Meskipun telah diperjuangkan sejak abad ke-17, diskriminasi gender masih terjadi dalam masyarakat di hampir seluruh dunia. Karena masih adanya diskriminasi gender maka hal tersebut mendorong masuknya isu gender dalam Tujuan Pembangunan Millenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000. Dengan berakhirnya pelaksanaan MDGs pada tahun 2015, isu ini dilanjutkan dalam program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. SDGs memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Salah satu topik yang diangkat dalam SDGs adalah tentang isu kesetaraan gender yang tercantum dalam tujuan ke-5 yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”.⁷

Di Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Development Programme* (UNDP) mengimplementasikan program kesetaraan gender yaitu *UNDP Indonesia’s Gender Equality Strategy* yang mencakup sejumlah strategi dengan empat capaian yaitu pekerjaan dan penghasilan yang layak, akses setara dalam pelayanan sosial yang berkualitas dan perlindungan sosial, manajemen sumber daya yang berkelanjutan dan peningkatan ketangguhan,

⁷ Dina Nur Rahmawati, Indah Lukitasari, and Anugrah Pambudi Raharjo, *PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER*, 2018, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018).

serta akses terhadap institusi publik yang responsif dan perlakuan yang adil. *United Nations* mengungkapkan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mencapai *Millenium Development Goals* (MDGs) dalam isu kemiskinan, pendidikan dan kesehatan pun mendorong Indonesia untuk memulai melangkah menuju 17 capaian dalam SDGs termasuk kesetaraan gender.⁸

Sustainable Development Goals tujuan lima: kesetaraan gender memiliki beberapa target global yang menjadi tolak ukur dalam melaksanakan tujuan SDGs nomor lima, yakni 1) mengurangi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, 2) menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ranah publik dan privat, termasuk perdagangan manusia dan seksual serta jenis eksploitasi lainnya, 3) menghapuskan seluruh praktik berbahaya, seperti perkawinan anak dan perkawinan paksa, serta sunat perempuan, 4) mengakui dan menghargai perawatan dan kerja domestik tak dibayar dengan cara penyediaan layanan publik, infrastruktur publik, serta kebijakan perlindungan sosial dan promosi tanggung jawab bersama di dalam rumah tangga dan keluarga sesuai dengan kebiasaan nasional, 5) menjamin partisipasi penuh dan efektif perempuan serta peluang setara dalam kepemimpinan di seluruh tingkatan pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik, 6) menjamin akses universal kepada kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana disepakati dalam *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform for Action*

⁸ Elise Dwi Ratnasari, *UNDP Usung Strategi Baru dalam Upaya Kesetaraan Gender*, 2017, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170307063237-277-198288/undp-usung-strategi-baru-dalam-upaya-kesetaraan-gender>, diakses pada tanggal 30 Juli 2019.

serta dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam konferensi kajiannya, 7) melaksanakan reformasi untuk memberikan hak setara bagi perempuan kepada sumber daya ekonomi serta akses kepada kepemilikan dan kontrol atas lahan dan bentuk property lainnya, layanan keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional, 8) meningkatkan penggunaan teknologi pendukung, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendorong pemberdayaan perempuan, dan terakhir mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang efektif dan legislasi yang dapat dilaksanakan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan di segala tingkatan.⁹ Sembilan target dalam tujuan SDGs kelima inilah yang kemudian diadopsi oleh negara-negara yang ikut serta dalam program SDGs yang kemudian diimplementasikan menjadi target nasional masing-masing negara.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berpartisipasi dalam mengadopsi target global dengan mengembangkan sembilan target global tersebut menjadi beberapa target nasional antara lain; 1) peningkatan implementasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan di seluruh sektor melalui penyediaan kebijakan responsif gender (undang-undang, PP, Keppres, perda), 2) peningkatan perlindungan bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk dari perdagangan manusia, 3) peningkatan usia median pernikahan pertama di kalangan perempuan (peningkatan usia pernikahan pertama), 4) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai sektor, 5) penguatan kapasitas kelembagaan yang bertanggung jawab atas

⁹ Goal 5: Gender Equality Goal Targets, <https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html#targets>, diakses pada tanggal 30 Juli 2019.

pengarusutamaan gender, 6) peningkatan akses dan kualitas kesehatan dan reproduksi perempuan, 7) tersedianya kebijakan responsif gender di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan sebagainya, tersedianya kebijakan responsif gender tentang perencanaan dan penganggaran dalam berbagai sektor dan lainnya.¹⁰

Target nasional yang diadopsi dari target global tersebut merupakan tujuan yang menandakan bahwa masih ada masalah terkait kesetaraan gender di Indonesia yang menjadi pedoman bagi pemerintah Indonesia dalam memberantas isu ketidaksetaraan gender di Indonesia.

Tulisan ini akan membahas upaya-upaya *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam mengimplementasikan programnya. Untuk membahas upaya-upaya yang telah atau sedang dilakukan oleh UNDP, penulis memilih untuk melakukan penelitian terkait “Upaya *United Nations Development Programme* dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender di Indonesia Melalui Program *Sustainable Development Goals*” yang penulis harap dapat membantu memenuhi rasa akan keingintahuan penulis serta dapat menjadi penelitian yang berguna bagi masa depan.

1.2 Identifikasi Masalah

Isu gender telah menjadi pembahasan sentral dalam pembangunan, terutama pembangunan sumber daya manusia, karena kesetaraan dan keadilan gender

¹⁰ Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan, <https://sdg.komnasham.go.id/sdg-content/uploads/2017/04/Tujuan-5.pdf>, diakses pada tanggal 30 Juli 2019.

merupakan salah satu tantangan utama pembangunan.¹¹ Sejumlah data menunjukkan terdapat kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan. Rendahnya peran dan partisipasi perempuan dapat dilihat dalam bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan ekonomi. Selain itu, kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi dan ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial, dinilai masih rendah. Perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan pun dinilai juga masih terbatas karena perempuan masih mengalami berbagai bentuk tindakan diskriminasi. Pembangunan yang tidak mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkungan sosial masyarakat tidak dapat menghasilkan manfaat secara adil, efektif, dan akuntabel untuk seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.¹²¹³

Menurut direktur eksekutif *Women Research Institute*, Sita Aripurnami, M.Sc., wanita dianggap memiliki strata di bawah pria karena akar budaya di Indonesia yang banyak dianut oleh masyarakat dahulu adalah budaya patriarki. Budaya yang nilai-nilainya mengunggulkan para pria walaupun tidak menutup beberapa suku di Indonesia yang menganut budaya matrilineal seperti Suku Minangkabau, Suku Enggano, Suku Petalangan, Suku Aneuk Jamee, dan Suku Sakai. Wujudnya dapat dilihat dengan pembagian lingkup dan peran yang ada di Indonesia.¹⁴

¹¹ Pembangunan Kesetaraan Gender, https://www.bappenas.go.id/files/7014/0850/2296/BUKU_-_BS_RPJM_N_KG_-_UPDATE_9_AGUST_2014.pdf, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019.

¹² Dwi Rachmina. *Fenomena Kesetaraan Gender dalam Kredit*, Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian, Volume 3. No 1 (2009).

¹³ Yohanna M.L. Gultom, Susiati Puspasari, and Lilis Heri Miscicuh, *Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG): Kajian Awal*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2012).

¹⁴ Wawancara dengan Sita Aripurnami, Direktur Eksekutif di *Women Research Institute*, pada tanggal 1 Desember 2017.

Contoh pembagian lingkup dan peran tersebut adalah peran dimana pria beraktivitas di lingkup publik dan perempuan di lingkup domestik/privat atau rumah tangga. Peran pria disebut produktif dengan tugas mencari uang dan peran para perempuan disebut peran reproduktif yaitu hamil, melahirkan dan merawat. Perbedaan peran ini kemudian juga mempengaruhi pandangan tentang karakter atau sifat manusia yang dibedakan antara pria dan wanita. Pria dikatakan maskulin, kuat, kasar dan perempuan akrab dengan sifat feminin, lemah dan lembut.¹⁵

Perbedaan ini sebetulnya bukan suatu masalah yang besar. Tetapi, ketika perbedaan itu dijadikan dasar untuk membedakan pria dan wanita, disitu-lah letak masalahnya. Nilai budaya yang mengkonstruksi bagaimana masyarakat memandang atau memahami pria dan wanita inilah yang disebut dengan gender. Karena yang hakiki membedakan pria dan wanita adalah pada alat kelaminnya dan fungsi reproduksinya saja. Dari kondisi biologis ini kemudian diperpanjang ke dalam fungsi sosialnya. Inilah dasar awal terjadinya ketidaksetaraan gender di Indonesia.¹⁶

Ketika bentuk masyarakat dan situasi sosial masih belum sekompleks sekarang, pembedaan terhadap pria dan wanita itu masih tidak terlalu terasa. Tetapi apabila masyarakat dan situasi sosial sudah berkembang maka pembedaan tersebut menjadi terasa. Misalnya pada keluarga yang kondisi ekonominya terbatas, kesempatan sekolah akan diberikan kepada anak laki-laki karena nilai yang menganggap laki-laki yang lebih banyak berperan di sektor publik dan mencari uang, sedangkan

¹⁵ Ibid. Wawancara dengan Sita Aripurnami, pada tanggal 1 Desember 2017.

¹⁶ Op.Cit. Wawancara dengan Sita Aripurnami, pada tanggal 1 Desember 2017.

perempuan di dalam rumah dan melahirkan serta merawat anak. Masyarakat menganggap bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Inilah yang dahulu diperjuangkan oleh RA Kartini. Selain itu, perempuan dengan posisi kerja yang sama dengan laki-laki tetap tidak mendapatkan tunjangan yang sama dengan laki-laki. Laki-laki mendapatkan tunjangan keluarga karena harus menanggung anak-anak dan istri. Perempuan dianggap *single* jadi tidak dapat tunjangan keluarga. Perempuan dianggap tidak pantas untuk menjadi pemimpin, meski Indonesia sudah pernah punya presiden perempuan. Secara sosial masyarakat tetap belum bisa menerima perempuan pada posisi pengambil keputusan.¹⁷ Karena hal-hal inilah maka ketidaksetaraan di Indonesia perlu diperjuangkan.

Sustainable Development Goals (SDGs) dicetuskan untuk memperbaiki masalah ketidaksetaraan gender di dunia termasuk isu ketidaksetaraan yang juga terjadi di Indonesia. Dengan menetapkan agenda 15 tahun yang memasukkan kesetaraan gender menjadi satu dari tujuh belas tujuannya, *Sustainable Development Goals* (SDGs) berharap bahwa dengan dicetuskannya agenda yang menjadi pedoman ini, isu ketidaksetaraan gender di dunia, termasuk di Indonesia dapat menjadi lebih baik.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dalam bentuk pembatasan kurun waktu yaitu sejak mulainya SDGs pada tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2019, yang ditandai dengan berubahnya agenda 15 tahun dari *Millennium Development Goals* (MDGs)

¹⁷ Op.Cit. Wawancara dengan Sita Aripurnami, pada tanggal 1 Desember 2017.

menjadi *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian difokuskan kepada tujuan SDGs terkait ketidaksetaraan gender di Indonesia karena berdasarkan laporan tahunan UNDP terkait program SDGs semenjak tahun 2016 hingga pertengahan 2019, kesetaraan gender di Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan dan berada di tahap stagnan meskipun sudah dilakukannya banyak upaya oleh UNDP dan pemerintah Indonesia.¹⁸ Kesetaraan gender juga menjadi fokus penelitian dikarenakan isu ketidaksetaraan gender ini sedang menjadi topik perbincangan yang diperjuangkan secara global sehingga penulis ingin meneliti bagaimana perkembangan kesetaraan gender di Indonesia. UNDP sebagai organisasi internasional yang juga menaruh perhatian kepada isu kesetaraan gender terlihat dari upaya-upaya yang dilakukannya menjadi aktor yang penulis teliti dalam penelitian ini sehingga penelitian ini penulis fokuskan pada upaya UNDP dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, penulis mencapai suatu rumusan masalah penelitian yakni **“Bagaimana Upaya-Upaya UNDP dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender di Indonesia Melalui Program *Sustainable Development Goals*?”**

¹⁸Sustainable Development Report 2019: Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals, https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_sustainable_development_report.pdf, diakses pada tanggal 20 September 2019.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana upaya-upaya *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia melalui Program *Sustainable Development Goals*?”

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai syarat kelulusan dari Universitas Katolik Parahyangan program studi Hubungan Internasional. Selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi para peneliti dalam mengkaji upaya organisasi internasional mengimplementasikan programnya dan mengkaji agenda 2030: *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya isu ketidaksetaraan gender di Indonesia.

1.4 Tinjauan Pustaka

Dalam meneliti upaya UNDP dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs), penulis menggunakan beberapa literatur yang penulis temukan sebagai sumber informasi dan referensi bagi penulis dimana literatur-literatur tersebut adalah sebagai berikut:

Literatur pertama adalah buku yang ditulis oleh Jenny Parkes dengan judul “*Gender Violence in Poverty Contexts: The Educational Challenge*” yang

membahas tentang kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kekerasan gender.¹⁹ Kekerasan gender memang terkait dengan kemiskinan dan ketidaksetaraan tetapi hubungan ini tidak bersifat kausal dalam arah yang sederhana. Sejak 1980-an, kekerasan telah dibingkai dalam hal hak-hak anak dan hak-hak perempuan, meski sebagian besar masih dianggap independen satu sama lain. Definisi kunci, termasuk Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (DEVAW), definisi kekerasan berbasis gender (1993), dan definisi kekerasan terhadap anak-anak dalam Laporan PBB tentang Kekerasan terhadap Anak (2006) membahas kekerasan lebih dari sisi dampak daripada penyebabnya.²⁰ Padahal, kekerasan sebagian besar terkait dengan jenis-jenis tindak kekerasan tertentu yang dilakukan dalam kondisi tertentu. Perspektif tersebut menjadi fitur utama dari pelibatan badan-badan PBB dan LSM internasional dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan dan perlindungan hukum terhadap kekerasan berbasis gender, terutama di daerah konflik.

Multi-dimensionalitas ketidaksetaraan yang terkait dengan kekerasan dapat digunakan untuk menjelaskan koneksi antara kekerasan dengan kemiskinan. Misalnya, mengenai penindasan yang terkait dengan kerentanan sebagai ciri-ciri kemiskinan, beberapa di antaranya bersifat struktural, beberapa simbolis, dan beberapa yang mencampurkan keduanya. Jenis-jenis penindasan tersebut terdiri dari: eksploitasi; marginalisasi; kekerasan; ketidakberdayaan; imperialisme budaya; dan, dikecualikan dari pengambilan keputusan. Literatur pertama ini

¹⁹ Jenny Parkes, ed. *Gender Violence in Poverty Contexts: The Educational Challenge*. (Routledge, 2015).

²⁰Ibid. Jenny Parkes.

menjadi referensi penulis terkait dengan terlibatnya UNDP yang termasuk badan PBB dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia.

Literatur kedua yang penulis gunakan merupakan artikel yang berjudul “*Gender Empowerment and United Nations Peacebuilding*” yang ditulis oleh Theodora-Ismene Gizelis. Artikel ini menjelaskan keberadaan PBB yang dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan.²¹ Artikel ini menyatakan bahwa organisasi PBB percaya bahwa perempuan yang berstatus sosial dan ekonomi tinggi memiliki kemampuan untuk memperoleh banyak kesempatan dan mampu menjadi agen perubahan di dunia internasional. Sementara itu, perempuan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih rendah, pemberdayaan terhadap perempuan cenderung tidak berhasil. Artikel ini dapat membantu penulis dalam menjelaskan isu kesetaraan gender, dimana UNDP yang berada di bawah PBB memiliki peranan penting sebagai organisasi dalam membantu menjelaskan masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya perempuan yang memiliki status sosial dan ekonomi rendah.²²

Literatur ketiga adalah buku dengan judul “*Effectiveness and Reform of the United Nations Development Programme (UNDP)*” yang ditulis oleh Stephan Klingebiel.²³ Buku ini menjelaskan tentang peran UNDP sebagai aktor internasional yang berpartisipasi dalam proses pembangunan suatu negara dapat

²¹Theodora Ismene Gizelis. *Gender Empowerment and United Nations Peacebuilding*, Sage Journals, diakses pada 2 Agustus 2019.

²² Ibid. Theodora-Ismene Gizelis.

²³ Stephan Klingebiel, *Effectiveness and Reform of the United Nations Development Programme*, (London: Frank Cass, 1999).

secara efektif ikut andil melalui program-programnya. Klingebiel menggunakan tiga level faktor sebagai sumber yang memengaruhi efektivitas organisasi internasional, yaitu: 1) level konsepsi, 2) level struktur dan kebijakan, dan 3) level administrasi dan implementasi. Dengan menggunakan tiga aspek ini, Klingebiel menganalisis program-program organisasi UNDP dan berkesimpulan bahwa dalam menjalankan perannya, organisasi internasional UNDP tidak terlalu efektif dalam memberikan bantuan teknis dikarenakan beberapa penyebab dimana salah satu faktor terbesarnya adalah kurangnya strategi UNDP dalam mengimplementasikan program-programnya.²⁴

Literatur terakhir merupakan artikel yang ditulis oleh Stephen Morton, David Pencheon, dan Neil Squires dengan judul *Sustainable Development Goals (SDGs), and Their Implementation: A National Global Framework for Health, Development and Equity Needs a Systems Approach at Every Level*. Dalam artikel ini dijelaskan secara komprehensif mengenai program *Sustainable Development Goals*. Artikel ini juga menjelaskan bahwa dibutuhkan sistem perencanaan yang luas dan strategis untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam suatu kebijakan dan tindakan suatu negara. Menurut Morton dan kawan-kawan masih banyak negara yang belum terlalu mengerti perbedaan antara MDGs dan SDGs, terkhusus keuniversalan program tersebut dan mereka percaya bahwa masyarakat dunia perlu membangun suatu sistem yang secara luas dimengerti dalam mendukung suatu perubahan.²⁵

²⁴ Ibid. Stephan Klingebiel.

²⁵ Stephen Morton et al., *Sustainable Development Goals (SDGs) and Their Implementation: A National Global Framework for Health, Development and Equity Needs a Systems Approach at Every Level*, *British Medical Bulletin*, Vol. 124 (2017): 81-90.

Literatur-literatur di atas merupakan beberapa penelitian terkait isu ketidaksetaraan gender, organisasi internasional *United Nations Development Programme*, dan program *Sustainable Development Goals*. Penulis melihat bahwa hingga saat ini masih belum ada penelitian yang membahas secara spesifik peran *United Nations Development Programme* dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia. Untuk itu penulis memilih topik penelitian terkait upaya UNDP dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs) guna menutup kekosongan penelitian (*research gap*) yang ada.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini digunakan guna mendapatkan hasil analisa yang tepat dan ter-struktur terkait upaya *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia melalui program SDGs. Penulis akan menjelaskan kerangka pemikiran ini melalui beberapa bagian yakni, penjelasan mengenai teori liberalisme dan liberalisme institusional dalam hubungan internasional dan kaitannya dengan topik penelitian, penjelasan singkat mengenai tiga peran utama organisasi internasional, penjelasan mengenai isu ketidaksetaraan gender di Indonesia, dan konsep pengarusutamaan gender yang dapat menjelaskan bahwa isu ketidaksetaraan gender ini merupakan suatu hal yang patut diperhatikan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 1999, hubungan internasional atau hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut

aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya; lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.²⁶

Dikarenakan adanya urgensi untuk mempelajari hubungan antar negara, timbul suatu studi yang dapat menganalisis aktivitas tersebut yakni studi hubungan internasional. Studi hubungan internasional merupakan disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antar-negara, termasuk peran sejumlah negara, organisasi antar-pemerintah (IGO), organisasi non-pemerintah internasional (INGO), organisasi non-pemerintah (NGO), dan perusahaan multinasional (MNC).²⁷

Pada awalnya, studi hubungan internasional cenderung lebih ter-fokus kepada isu-isu tradisional yang menyangkut masalah pertahanan dan keamanan seperti salah satu contohnya perang. Kekuasaan merupakan salah satu faktor dominan dalam hubungan internasional. Oleh sebab itu, paham realisme-lah yang pada zaman dahulu mendominasi dunia hubungan internasional. Namun seiring dengan berjalannya waktu, studi hubungan internasional mulai mengalami pergeseran dimana isu-isu yang dibahas tidak lagi hanya masalah seputar pertahanan dan keamanan namun termasuk isu perubahan iklim, keamanan informasi, kesehatan,

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999, https://pih.kemlu.go.id/files/UU-No.37.1999_-tentang-Hubungan-Luar-Negeri.pdf, diakses pada tanggal 25 Februari 2019.

²⁷ Romaniuk, Scott. (2018). *International Relations Theory*. https://www.researchgate.net/publication/328232673_International_Relations_Theory/citation/download, diakses pada tanggal 25 Februari 2019.

hak asasi manusia, dan masih banyak lagi yang dikenal sebagai isu-isu non-tradisional yang sudah tergolong menjadi isu keamanan nasional.²⁸

Selain mengalami perubahan isu, aktor dalam hubungan internasional juga mengalami perluasan. Dahulu, hubungan internasional hanya melihat negara sebagai satu-satunya aktor dalam aktivitas hubungan internasional. Namun, dengan munculnya teori liberalisme dalam dunia hubungan internasional, sekarang bukan hanya negara satu-satunya aktor dalam dunia hubungan internasional melainkan aktor non-negara seperti; organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan lain-lainnya juga tergolong sebagai aktor dalam dunia hubungan internasional.²⁹

Teori liberalisme dalam hubungan internasional digunakan untuk menjelaskan seberapa penting peran aktor non-negara dalam suatu aktivitas hubungan internasional khususnya organisasi non-pemerintah. Teori liberalisme dalam hubungan internasional merupakan kebalikan dari teori realisme dalam hubungan internasional dimana teori liberal secara primer menjelaskan suatu kondisi dimana kerja sama internasional merupakan sesuatu yang mungkin. Seperti yang sudah penulis nyatakan sebelumnya bahwa teori liberalisme melihat aktor penting dalam aktivitas hubungan internasional selain negara yakni aktor non-negara.³⁰

²⁸ Non-traditional Security Threats in Asia: Finding a Regional Way Forward, <http://www.eastasiaforum.org/2011/06/04/non-traditional-security-threats-in-asia-finding-a-regional-way-forward/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019.

²⁹ Robert Jackson & Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 105.

³⁰ Robert Jackson & Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 105.

Teori liberalisme dalam hubungan internasional didasari oleh empat asumsi utama dan satu asumsi tambahan. Pertama adalah negara maupun aktor non-negara, aktor transnasional adalah entitas penting dalam politik dunia. Contohnya adalah suatu organisasi internasional atau organisasi non-pemerintah, organisasi transnasional dan sebagainya mempunyai peran yang penting dalam politik dunia. Bahkan teori liberal pun melihat bahwa suatu individu dapat memberikan suatu dampak yang signifikan. Jika dipersingkat, asumsi pertama ini melihat bahwa liberalisme memiliki citra bahwa berbagai jenis aktor negara dan non-negara memiliki peran yang penting dalam politik dunia.³¹

Asumsi kedua, teori liberalisme melihat ekonomi atau berbagai bentuk lain dari interdependensi dan keterkaitan internasional antara negara dan aktor non-negara sebagai sesuatu yang memiliki efek terhadap perilaku negara. Asumsi ketiga adalah teori liberal melihat bahwa agenda politik internasional sangat luas. Teori liberal menolak pernyataan bahwa agenda politik internasional hanya didominasi oleh masalah keamanan dan militer saja. Menurut teori liberal, masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan juga merupakan suatu isu yang penting. Asumsi keempat dari teori liberalisme adalah pendekatan dalam-luar (*inside-out*) yang meneliti bagaimana faktor-faktor pada tingkat negara-masyarakat dan individu yang ada dalam tingkatan analisis dapat mempengaruhi hubungan internasional dan hasil dari hubungan internasional tersebut. Asumsi ke-lima selaku asumsi tambahan dalam teori liberalisme melihat bahwa tugas analitis utama adalah menemukan dalam

³¹ Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi, *International Relations Theory 5th edition* (London: Pearson Education, 2012), hlm. 129.

kondisi apa suatu kerja sama internasional, jika bukan perdamaian, dapat dicapai dan disini menurut teori liberal peran organisasi internasional menjadi fokus utama.³²

Perspektif liberalisme adalah salah satu dari beberapa perspektif yang berkembang dalam studi hubungan internasional. Perspektif liberalisme telah membawa dampak yang mendalam terhadap bentuk masyarakat industrial modern. Walaupun sempat tersisihkan oleh perspektif realisme selama Perang Dingin, varian-varianya justru berkembang menjadi semakin banyak. Di era di mana globalisasi semakin meluas, perspektif liberalis tetap menjadi salah satu perspektif yang dominan.

Salah satu ciri khas liberalisme adalah pandangan ini lebih menekankan pada peran ‘politik tingkat rendah’ (*low-politics*) sehingga liberalis memberi perhatian yang lebih besar pada karakter interaksi sehari-hari dan membedakannya dengan perkembangan politik tingkat tinggi (*high-politics*) atau realisme. Menurut teori liberal, keberhasilan tertib internasional sedikitnya bergantung pada empat faktor utama: 1) Peranan institusi internasional. 2) Norma dan aturan internasional untuk mengatur perilaku negara-negara, 3) Peningkatan interdependensi ekonomi antarnegara, dan 4) Perkembangan teknologi dan pertumbuhan komunikasi global. Keterkaitan antara keempat faktor tersebut akan melahirkan kerja sama, menumbuhkan kepercayaan antar-negara, dan mengedepankan negosiasi sebagai sarana untuk mengatasi sengketa negara. ³³

³² Op.Cit. Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi, hlm. 130.

³³ Umar Suryadi Bakry. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*. (Kencana, 2017).

Istilah 'institusionalisme' menunjukkan rasa percaya penganut paham liberal bahwa pembentukan institusi-institusi internasional akan mengarah pada konfigurasi baru dalam politik internasional. Perkembangan ini dapat dilihat sebagai bukti lebih lanjut dari karakter kompleks interdependensi internasional. Kaum liberalis institusional memfokuskan perhatiannya pada fungsi hukum dan peran institusi internasional, dengan tesis yang mengatakan bahwa hukum dan institusi internasional mendorong penyesuaian dan kerja sama internasional.³⁴ Yang dimaksud institusi internasional dalam pandangan ini dapat berupa organisasi-organisasi internasional formal yang mewakili negara-negara, maupun aturan-aturan resmi, kesepakatan-kesepakatan, dan konvensi-konvensi yang memfasilitasi interaksi antar-negara.

Teori liberalisme dan liberalisme institusional menjadi teori yang menjelaskan bagaimana hubungan internasional sudah tidak hanya terfokus pada negara dan kekuasaan saja melainkan adanya peran organisasi internasional. Penelitian ini membahas UNDP dan juga menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk mencapai suatu tujuan serta sebagai teori yang menjelaskan meluasnya isu di dunia hubungan internasional dimana isu yang dikaji tidak lagi hanya isu tradisional saja melainkan isu non tradisional juga termasuk ke dalam pokok bahasan dunia hubungan internasional.

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk oleh kesepakatan antara anggota, pemerintah atau non-

³⁴ Vinsensio Dugis. *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. (Cakra Studi Global Strategis, 2016).

pemerintah, dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mengerjar kepentingan bersama dari keanggotaan organisasi tersebut. Organisasi internasional memiliki tiga karakteristik utama yakni; keanggotaan, tujuan, dan struktur.³⁵

Dalam menjalankan perannya, organisasi internasional mempunyai tiga peran utama yang terbagi menjadi; instrumen, arena, dan aktor. Maksud dari peran organisasi internasional sebagai instrumen adalah organisasi internasional mempunyai peran sebagai sarana negara anggotanya dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan peran organisasi internasional sebagai arena adalah organisasi internasional menjadi wadah bagi negara-negara untuk membuat perjanjian internasional, memutuskan segala tindakan yang diambil oleh negara anggotanya, menjadi wadah sebagai representasi pimpinan-pimpinan negara, dan menjadi tempat negara-negara merumuskan keputusan. Peran organisasi internasional sebagai aktor adalah sebagai bagian dari aktor dalam hubungan internasional. Organisasi internasional dapat bergerak secara independen sesuai dengan kapabilitasnya sendiri sehingga tidak bergantung pada negara manapun dan memiliki agenda tersendiri dan merupakan aktor tunggal.³⁶

Tiga peran utama organisasi internasional disini akan menjadi salah satu instrumen analisis dalam penelitian ini untuk melihat dan mengklasifikasikan peran UNDP sebagai organisasi internasional.

³⁵ Clive Archer, *International Organizations Third Edition* (New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2001), hlm. 33.

³⁶ Op. Cit. Clive Archer.

Masalah dalam politik internasional tidak terbatas pada masalah keamanan dan militer, namun juga masalah ekonomi, politik, dan sosial, termasuk ketidaksetaraan gender yang juga merupakan salah satu masalah internasional yang patut untuk diperhatikan. Penelitian ini meneliti mengenai salah satu masalah internasional yakni ketidaksetaraan gender yang terjadi di Indonesia.

Isu ketidaksetaraan gender sebenarnya sudah ada sejak lama. Menurut Direktur Eksekutif *Women Research Institute*, Sita Aripurnami, M.Sc., wanita dapat dianggap bahwa stratanya berada di bawah pria karena akar budaya yang lazim dianut oleh masyarakat pada dulunya adalah budaya patriarki. Dimana budaya patriarki adalah budaya yang nilai-nilainya mengunggulkan para pria dibandingkan wanita. Wujudnya dapat dilihat dengan pembagian lingkup dan peran yang ada di Indonesia. Pria beraktivitas di lingkup publik dan perempuan di lingkup domestik atau privat atau rumah tangga. Sedangkan peran para pria disebut peran produktif yang dimana tugasnya adalah mencari uang dan peran para perempuan disebut peran reproduktif yaitu hamil, melahirkan dan merawat.³⁷

Akar budaya yang dianut dan pembagian peran di Indonesia ini kemudian juga mempengaruhi pada pandangan tentang karakter atau sifat manusia yang dibedakan terhadap pria dan wanita. Pria dikatakan maskulin, kuat, kasar dan perempuan akrab dengan sifat feminin, lemah dan lembut. Perbedaan ini sebetulnya bukan suatu masalah yang besar, sah-sah saja. Tetapi, ketika perbedaan itu dijadikan dasar untuk membedakan pria dan wanita, disitu-lah letak masalahnya. Nilai budaya yang

³⁷ Hasil wawancara dengan Sita Aripurnami, Direktur Eksekutif di *Women Research Institute*, pada tanggal 1 Desember 2017.

mengkonstruksi bagaimana masyarakat memandang atau memahami pria dan wanita inilah yang disebut dengan gender. Karena yang hakiki membedakan pria dan wanita adalah pada alat kelaminnya dan fungsi reproduksinya saja. Dari kondisi biologis ini kemudian diperpanjang ke dalam fungsi sosialnya. Inilah dasar awal terjadinya ketidaksetaraan gender di Indonesia.³⁸

Jika membahas isu ketidaksetaraan gender, seringkali ditemukan kata “pengarusutamaan gender”. Konsep pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) selama beberapa dekade terakhir telah berkembang dan dipraktikkan di berbagai negara dan lembaga dalam berbagai konteks. Hal ini kemudian berdampak pada penerimaan, implementasi, dan hasil kebijakan dari masing-masing negara atau lembaga tersebut. Situasi ini tidak dapat dihindari karena pengarusutamaan gender adalah strategi yang menuntut.³⁹ *United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)* mendefinisikan konsep ini sebagai “Pengarusutamaan perspektif gender merupakan proses menilai implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk undang-undang, kebijakan atau program, di bidang apa pun dan di semua tingkatan. Hal ini merupakan strategi untuk menjadikan keprihatinan dan pengalaman perempuan serta laki-laki sebagai bagian integral dari desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di semua bidang politik, ekonomi dan sosial, sehingga perempuan dan laki-laki mendapat manfaat yang sama, dan

³⁸ Op.Cit. Wawancara dengan Sita Aripurnami, pada tanggal 1 Desember 2017.

³⁹ Mark A. Pollack, and Emilie Hafner-Burton. *Mainstreaming gender in the European Union. Journal of European public policy* 7.3 (2000): 432-456.

ketidaksetaraan tidak diabadikan. Tujuan utama pengarusutamaan adalah mencapai kesetaraan gender.”⁴⁰

Konteks pengarusutamaan gender tidak hanya keterlibatan dalam pengembangan proyek-proyek perempuan yang keberadaannya terpisah dari program kerja atau komponen mengenai perempuan pada program kerja. Kesetaraan gender mengharuskan adanya perhatian terhadap perspektif gender sebagai bagian integral dari semua kegiatan di semua program, baik yang dicanangkan oleh pemerintah atau lembaga. Hal ini juga melibatkan perspektif gender menjadi lebih sentral dalam semua pengembangan kebijakan, penelitian, advokasi, pengembangan, implementasi dan pemantauan norma dan standar, dan perencanaan, implementasi dan pemantauan proyek.⁴¹

Praktek pengarusutamaan gender dalam institusi atau lembaga terjadi dalam tiga tahap, yaitu adopsi kesetaraan gender atau pengarusutamaan gender dalam proses organisasi, adopsi pengarusutamaan gender dalam kebijakan atau program kelembagaan, dan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender. Tahapan-tahapan tersebut tentu memiliki berbagai kendala, namun telah mencerminkan adanya praktik pengarusutamaan gender. Kendala dalam praktik-praktik pengarusutamaan gender tersebut termasuk instrumentisasi isu gender, resistensi

⁴⁰ ILO, *Gender Equality Tool, International Labor Organization*, <https://www.ilo.org/public/english/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2019.

⁴¹ UNDP, *Gender Mainstreaming Made Easy: Handbook For Programme Staff*, United Nations Development Programme, https://www.undp.org/content/dam/somalia/docs/Project_Documents/Womens_Empowerment/Gender%20Mainstreaming%20Made%20Easy_Handbook%20for%20Programme%20Staff1.pdf, diakses tanggal 4 Agustus 2019.

birokrasi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan tidak adanya mekanisme evaluasi.⁴²

Strategi pengarusutamaan gender yang diterapkan bukan berarti bahwa kegiatan yang ditargetkan untuk mendukung perempuan (*women empowerment program*) tidak lagi diperlukan. Kegiatan tersebut khusus menargetkan prioritas dan kebutuhan perempuan, melalui, misalnya, undang-undang, pengembangan kebijakan, penelitian dan proyek/program di lapangan. Program yang dikhususkan untuk perempuan memainkan peran yang penting dalam mempromosikan kesetaraan gender.

Pengarusutamaan gender membutuhkan identifikasi isu-isu gender dalam proses perancangan, implementasi dan evaluasi semua kebijakan yang bertujuan bukan hanya untuk menambah birokrasi tetapi untuk menyediakan sarana yang sesuai untuk mempertimbangkan efek gender dari kebijakan sejak awal dan untuk memberikan perspektif transformatif yang baru dan berpotensi pada pendekatan kebijakan dan pada organisasi dan masyarakat. Pengarusutamaan gender pada prinsipnya harus mempromosikan pendekatan yang lebih sinkron dengan pemerintah dengan memberikan analisis yang lebih holistik mengenai dampak kebijakan secara luas, bukan hanya dampak langsung dan penerima manfaat yang didefinisikan secara sempit.⁴³ Namun dalam praktiknya pendekatan yang diambil mungkin jauh lebih terbatas. Hal ini mungkin hanya melibatkan pemisahan gender dari penerima manfaat potensial dan aktual dan hanya merupakan kebijakan-

⁴² Athiqah Nur Alami. *The Implementation of Gender Mainstreaming in ASEAN*. IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies 1.2: 185-207.

⁴³ Jill Rubery. *Gender Mainstreaming and Gender Equality in the EU: The Impact of the EU Employment Strategy*. Industrial relations journal 33.5 (2002): 500-522.

kebijakan yang dianggap dapat memiliki efek gender yang cukup jelas. Upaya parsial untuk pengarusutamaan ini mungkin masih penting karena bisa menjadi awal dari pendekatan menuju pengarusutamaan gender.

Implementasi pengarusutamaan gender dapat dianggap sebagai potensi perubahan radikal terhadap seluruh proses pembuatan kebijakan. Namun hal ini belum tentu dapat diterima baik oleh berbagai negara maupun lembaga dalam semua institusinya. Berdasarkan perspektif tersebut, setiap pergerakan menuju pendekatan yang lebih holistik untuk pembuatan kebijakan dapat dilihat sebagai hasil yang signifikan dari pendekatan yang dilakukan oleh negara atau lembaga tersebut. Dengan mempertimbangkan masalah interpretasi ini, dapat dilanjutkan dengan menilai apa dampak komitmen terhadap kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender sejauh ini terhadap kebijakan aktual di negara atau lembaga yang sudah menerapkannya.

Konsep pengarusutamaan gender digunakan untuk mendukung penelitian ini dengan melihat sudah sejauh mana tahap implementasi program kerja sama organisasi internasional UNDP dan Pemerintah Indonesia dengan kaitannya dengan konsep pengarusutamaan gender.

Teori dan konsep yang sudah penulis jelaskan di atas merupakan teori dan konsep yang penulis kira dapat menjadi instrumen yang tepat dan dapat mendukung hasil penelitian yang penulis lakukan ini. Teori dan konsep tersebut juga akan menjadi instrumen yang membantu penulis dalam menganalisis dan menjelaskan penelitian ini untuk lebih mudah dan lebih jelas sehingga dapat dimengerti.

1.6 Metoda Penelitian

Metoda penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metoda penelitian kualitatif. Metoda penelitian kualitatif menurut John Creswell adalah metode yang menggunakan analisis data yang dikumpulkan terlebih dahulu dalam rupa bacaan, maupun gambar.⁴⁴ Metode penelitian kualitatif diterapkan guna menjawab pertanyaan penelitian yang sudah penulis rancang secara deskriptif dimana deskriptif berarti penulis akan berupaya untuk memaparkan penelitian penulis dengan fakta-fakta yang ada dan disertai oleh penjelasan tambahan yang mungkin dapat membantu penelitian ini sehingga lebih mudah dimengerti.

Dengan begitu, karena penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan deskriptif maka penelitian ini akan dilengkapi dengan data dan fakta yang diharap oleh penulis dapat membantu penulis, pembaca, maupun peneliti berikutnya untuk dapat lebih memahami hasil dari penelitian yang penulis lakukan.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam menulis penelitian ini adalah teknik pengumpulan data studi dokumen (berbasis internet) atau studi pustaka yang mencakup data primer dan sekunder. Penelitian ini akan membandingkan data-data yang ter-kumpul dan penganalisisan data yang diharapkan dapat memunculkan suatu informasi baru yang dapat berguna.

⁴⁴ John. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Third Edition* (California: Sage Publications, 2009), hlm. 174.

Tidak hanya studi dokumen (berbasis internet) atau studi pustaka saja yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian ini. Teknik pengumpulan data berikutnya adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara dimana penulis melakukan wawancara yang bersifat ter-struktur yakni wawancara dimana penulis sudah menyiapkan beberapa buah pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yang kemudian penulis olah dan menjadi bagian penting dari penelitian yang penulis lakukan dan menjadikan data dari wawancara ini sebagai data primer. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Ibu Sita Aripurnami selaku Direktur Eksekutif *Women Research Institute*, Bapak Setyo Budiantoro selaku perwakilan dari Sekretariat SDGs Indonesia, dan Ibu Nona Gae Luna selaku perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

1.8 Sistematika Pembahasan

Penelitian yang penulis lakukan dibagi ke dalam empat bab dan setiap bab besar memiliki sub-bab atau cabang. Dalam bab satu, penulis membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metoda dan teknik pengumpulan data, sistematika pembahasan serta linimasa penelitian dalam mengkaji peran *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam upayanya meningkatkan kesadaran masyarakat di Indonesia terkait program kerja mereka yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs) terkhusus tujuan nomor lima: kesetaraan gender.

Bab dua mengkaji organisasi *United Nations Development Programme*, Ketidaksetaraan Gender, dan SDGs. Bab ini menjelaskan tentang organisasi internasional UNDP, isu ketidaksetaraan gender, dan program-program UNDP yang terbagi menjadi; penjelasan organisasi internasional UNDP secara umum dan di Indonesia. Selanjutnya, dibahas isu ketidaksetaraan gender di dunia dan Indonesia. Lalu, dibahas juga program SDGs di dunia dan Indonesia, serta program SDGs nomor 5 terkait kesetaraan gender di dunia dan di Indonesia.

Bab tiga menjadi bab dimana penulis melakukan analisis variabel dalam judul penelitian penulis yang terbagi menjadi tiga bagian yang merupakan program-program UNDP yaitu; mengimplementasikan Strategi Pengarusutamaan Gender UNDP (2018-2021), mengadopsi Program Segel Sertifikasi UNDP, dan mengampanyekan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan.

Bab empat adalah kesimpulan penelitian.